

DEMOKRASI LEWAT BACAAN

Oleh Nurcholish Madjid

Setelah lebih setengah abad merdeka, bicara tentang demokrasi di negeri kita masih ibarat mengunjungi sebuah rumah antik. Misalnya rumah Thomas Jefferson, orang yang mengaku segan beragama tapi sepenuhnya yakin kepada Tuhan Yang Mahaesa, dan nilai-nilai universal (*deist-unitarianist-universalist*). Dalam hal demokrasi ini, kita mungkin dapat memahami desain, tata ruang, dan susunan perabotannya, tapi belum tentu dapat dengan tepat punya gambaran bagaimana penghuninya dulu hidup. “Demokrasi” memang barang antik.

Amerika menegaskan keantikannya dengan menghidupkan kembali gedung Capitol Yunani kuno untuk semua gedung perwakilannya di pusat dan di negara-negara bagian. Tetapi di Yunani sendiri sudah sejak ribuan tahun lalu demokrasi dilupakan orang. Dan setelah sistem Eropa Timur kini hancur berantakan, “demokrasi” semakin menjadi cap dagang utama bangsa-bangsa Nordik atau Anglo-Sakson. Hanya mereka yang saat ini mengaku benar-benar demokratis. Barangkali terkecuali sedikit bangsa bukan Anglo-Sakson, seperti Prancis, Italia, dan Jepang.

Demokrasi antik di Indonesia bukan ide dasarnya, melainkan kontroversinya. Dalam sejarah sekitar proklamasi, kita dapat masalah demokrasi telah menjadi bahan perdebatan sengit antara pendiri Republik ini. Kita merasa kenal dengan jargon-jargon mereka: “dewan,” “rakyat,” “majelis,” “musyawarah” “mufakat,” dan seterusnya. Juga ada pinjaman yang lebih kontemporer: “*delegation*

of authority,” “decision by representation,” “rule of law,” “majority rule and minority right,” dan entah apa lagi.

Kita merasa kenal semuanya. Tapi rasanya tidak mungkin kita mengakui benar-benar mengerti maksudnya, apalagi menggambarkan dengan tepat bagaimana masing-masing yang mengklaim demokrasi itu bertingkah laku. Malah konon, ada di antara mereka yang begitu bersemangat mengumandangkan demokrasi, namun dalam hidup nyata sehari-harinya sendiri, ia tidak melaksanakannya. Meskipun banyak buku yang dibaca dan berbagai istilah dan frasiologi demokrasi yang dihafal, di rumahnya atau lebih mungkin lagi di kantornya, ia adalah seorang diktator dalam sistem Soviet super mini (misalnya dengan terus-menerus mengibuli “rakyatnya” dan membiarkan mereka putus informasi). Dalam kondisi seperti itu, bagaimana mungkin dia menjadi seorang demokrat sejati! Apalagi kalau ia mudah sekali tersinggung! *“He easily got mad at the slightest difference of opinion,”* — seorang teman asing mencoba mendukung. “Jangan-jangan ia dulu bicara tentang demokrasi tidak karena menghayatinya, tapi karena itulah komoditi politik yang paling laku,” komentar teman asing yang lain.

Memang masalah demokrasi selalu menarik, lihat saja kasus Bung Karno. Dengan kemampuan retorikanya yang hebat itu, ia adalah pembela demokrasi yang bersemangat. Namun, sungguh ironis, ia jatuh karena tuduhan sebagai seorang diktator yang membiarkan terjadinya kultus individu terhadap dirinya. Dan karena punya pandangan sendiri tentang apa itu demokrasi, ia acapkali menuding para pengklaim demokrasi yang lain sebagai tidak lebih daripada kaki tangan “Nekolim.” Para pemimpin Masyumi, misalnya, sangat menderita oleh tuduhan semacam itu. Bahwa mereka kaki tangan “Nekolim,” terasa sungguh mustahil, mengingat peran positif mereka yang cukup besar dalam ikut meletakkan batu pertama fondasi kemerdekaan kita. Tetapi memang para pemimpin Masyumi saat itu, bersama dengan mereka dari PSI, Parkindo, dan Partai Katolik, adalah tokoh-tokoh yang banyak menggunakan jargon-jargon politik modern (Barat). Ini

tentu menjadi hak mereka, dan dapat dibenarkan karena mereka termasuk barisan pertama warga Indonesia yang berpendidikan modern (Belanda) dan merupakan “*The Indonesian first rate intellectuals*.” Para peninjau asing pun banyak yang menilai mereka sebagai pendukung demokrasi Barat.

Karena itu, dapat dimengerti jika mereka kecewa sekali bahwa sikap kritis terhadap Bung Karno — yang kemudian menjadi benar — mereka tidak menghasilkan imbalan apa-apa di awal Orde Baru. Lebih pahit lagi mengenang pengalaman bagaimana usaha mereka membendung Bung Karno dan PKI — lewat pembentukan Liga Demokrasi — gagal hanya karena kesalahpahaman, atau ketidakpahaman, atau perbedaan kepentingan (*vested interest*) dari kelompok yang mereka harapkan akan mendukung tapi ternyata, kata mereka, malah menghalangi.

Para “penghayat demokrasi” barangkali masih harus mempelajari pandangan teoretis yang lebih “absah” tentang kekuasaan politik di kalangan rakyat. Seperti menjadi sasaran kritik pedas sekelompok sarjana teori politik yang dianut sebagian besar kaum Muslim (yang berarti sebagian besar rakyat kita) sangat berat berorientasi kepada keamanan dan kestabilan, sehingga menjadi konservatif dan anti perubahan, sebab suatu perubahan dapat membawa kekacauan (*fawdlā*). Maka, Kiai Shalih dari Semarang misalnya, dalam sebuah kitabnya yang berbahasa Jawa dan bertuliskan Arab Pegon, menegaskan perlunya orang Islam berpegang pada pandangan politik Sunni klasik bahwa pemberontakan pada kekuasaan yang sah, biar pun zalim, adalah terlarang menurut agama, meskipun wajib melakukan amar makruf nahi mungkar. “Enam puluh tahun di bawah pemerintahan yang zalim (tapi efektif) lebih baik daripada sehari tanpa pemerintahan (yang mengakibatkan kekacauan).” Ia menegaskan prinsip ini, yang konon katanya dari sebuah hadis.

Atau lihat Ibn Taimiyah yang katanya, panutan kaum “modernis” itu. Ia berkata “Tuhan mendukung kekuasaan yang adil meskipun kafir, dan tidak mendukung kekuasaan yang zalim meskipun Islam!” Ia juga berkata “dunia akan tetap bertahan

dengan keadilan sekalipun kafir, dan tidak akan bertahan dengan kezaliman sekalipun Islam!” Ini karena, baginya, ide Islam tentang kekuasaan dan negara ialah keadilan. Barangkali sejiwa dengan dalil ini, Amerika yang Protestan pernah punya presiden Katolik, J.F. Kennedy. Atau India yang Hindu pernah punya presiden yang Muslim, Zahir Hussein (walaupun presiden di sana hanyalah lambang). Atau Filipina yang Katolik, pernah punya presiden Protestan, Fidel Ramos.

Demokrasi memang tak terelakkan, tapi penuh persoalan. Karena itu, harus selalu sempat dibicarakan dalam suatu ruang publik. Hanya saja, barangkali, jangan terlalu gaduh, karena bisa dianggap sebagai lelucon atau guyonan. Apalagi jika kita sendiri, para pengajurnya, tidak mampu memberi teladan. Apakah kita menganjurkan orang lain berbuat kebaikan, tapi diri sendiri terlupakan? Padahal kita tahu perkara demokrasi ini lewat bahan bacaan.^[❖]